

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini menganalisis tentang pendekatan dan upaya yang dilakukan oleh kandidat perempuan dari kalangan politisi akar rumput dalam membangun jaringan pemenangan dan merawatnya untuk memenangkan kontestasi legislatif lokal. Jaringan merupakan bagian penting dari modalitas bagi kandidat untuk berkompetisi. Bukan hanya sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau konstituen yang bersifat sekali selesai, tetapi akan turut menentukan peluang kesuksesan kontestasi pada periode berikutnya. Dalam konteks politisi perempuan akar rumput, jaringan adalah alat yang dapat meminimalisir besarnya hambatan bagi perempuan untuk berkontestasi dalam politik. Kendati demikian, studi yang membahas secara spesifik tentang persoalan ini belum banyak dilakukan. Temuan-temuan sebelumnya lebih banyak membahas perihal modal finansial sebagai elemen utama yang menentukan berhasil atau tidaknya kompetisi elektoral bagi kandidat perempuan (Aspinall, White, & Savirani, 2021; Choi, 2019; Bjarnegard & Kenny, 2016).

Pemilu 2024 diketahui mencatat angka keterwakilan tertinggi bagi terpilihnya calon legislatif perempuan di Indonesia (Kompas, 2024). Sebanyak 127 kandidat perempuan (21,9%) berhasil terpilih menduduki kursi legislatif DPR RI dari total 580 anggota parlemen nasional. Akan tetapi, capaian ini bukanlah sesuatu yang dapat diglorifikasi. Sepanjang sejarah Pemilu, Indonesia belum pernah

mencapai keterwakilan perempuan 30% sebagaimana yang dimuat dalam kuota afirmasi. Capaian Pemilu 2024 juga masih berada di bawah rata-rata dunia yang mencatat keterwakilan perempuan di angka 26,9% (International Parliamentary Union, 2024). Jika dilihat dari sisi peluang keterpilihan, kandidat perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan kandidat laki-laki. Total calon legislatif perempuan yang maju dalam Pemilu 2024 adalah 37,7% dari 10.323 orang kandidat secara keseluruhan (Indonesiabaik.id, 2024). Artinya, kandidat perempuan hanya memiliki peluang keterpilihan sebesar 1,23%. Adapun kandidat laki-laki memiliki angka peluang keterpilihan sebesar 4,39% atau 3,5 lipat lebih tinggi dari peluang terpilihnya kandidat perempuan.

Kecilnya peluang keterpilihan kandidat perempuan menunjukkan bahwa jalan perempuan untuk mencapai kepemimpinan politik formal lebih terjal dan berliku. Sejumlah literatur telah mencatat berbagai kendala yang menghambat kandidat perempuan untuk memenangkan kontestasi. Hambatan tersebut mengelilingi para politisi perempuan mulai dari tahap meyakinkan diri (Maguire, 2018), kandidasi oleh partai (Sulastri, 2024; Bjarnegard & Kenny, 2016), hingga bersaing memperebutkan suara pemilih (Rofhani, 2024; Savirani, 2024). Meskipun telah diakselerasi dengan kuota afirmasi, proses rekrutmen kandidat masih memakai analogi “taman rahasia politik”. Di dalamnya terdapat banyak aspek formal dan informal sekaligus yang saling berkelindan dan relevan dengan analisis gender. Dimensi formal saja seperti peraturan, struktur partai, dan sistem pemilu, dianggap belum cukup komprehensif untuk menjelaskan tentang gender dan keterwakilan kandidat. Ada dimensi lain seperti pengaruh lokal dan subjektivitas

rekrutmen partai, yang pada gilirannya aturan formal dalam pengambilan keputusan mengenai kandidat tidak selalu sejalan dengan praktik informal dan keputusan *de facto* yang diambil pada berbagai tingkat.

Studi lain menemukan bahwa hambatan perempuan dalam berkontestasi datang dari berbagai aspek, mulai dari faktor kultural, struktural, dan institusional (Andriana, 2012). Budaya patriarki yang masih tertanam kuat ditengarai menjadi penyebab rendahnya progresivitas politik perempuan, yang selanjutnya memunculkan jurang ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2022; Elizabeth, 2019; Suryakusuma, 2021). Lebih jauh, kondisi ini membentuk disparitas modal politik (Wungu, 2022). Perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang diperhitungkan karena dianggap memiliki daya tawar yang rendah, baik dari aspek figur maupun kepemilikan sumber daya.

Besarnya hambatan yang menyelimuti politisi perempuan mengharuskan mereka untuk pandai bersiasat agar menembus sekat-sekat yang menghalangi. Literatur mencatat dua model jalur yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan dan memuluskan kontestasi bagi perempuan, yakni jalur elit dan non-elit (Bayo, 2021). Pada model pertama, kebanyakan dari mereka biasanya memiliki latar belakang dinasti. Lalu pada model kedua, mereka diidentikkan dengan politisi akar rumput yang bergerak dari bawah. Sebagian besar studi menyorot kandidat perempuan yang berasal dari jalur elit akan lebih mudah menembus hambatan-hambatan kontestasi (Choi, 2019; Aspinall, White, & Savirani, 2021; Wardani & Subekti, 2021).

Studi Wardani & Subekti (2021) misalnya, ia menemukan bahwa pengalaman lima belas tahun penerapan kuota gender di Indonesia antara 2004 – 2019 lebih banyak diisi oleh politisi perempuan yang berasal dari latar belakang dinasti. Proporsi perempuan yang memiliki koneksi dinasti meningkat, yang menunjukkan pentingnya jaringan struktural, kuasa elit lokal, dan sumber daya keuangan dalam politik Indonesia. Hasil Pemilu Legislatif 2009, khususnya di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua, juga menunjukkan hal serupa (Andriana, 2012). Perempuan yang terpilih adalah mereka yang memiliki strata sosial tinggi dan berasal dari keluarga elit setempat. Dalam temuan ini, modal simbolik turut memainkan peran yang penting.

Sejumlah faktor berhasil diidentifikasi terkait penyebab perempuan yang berasal dari latar belakang elit atau dinasti mampu menembus kontestasi politik dengan lebih mudah (Bjarnegard & Kenny, 2016; Firmansyah & Faradhila, 2022; Aspinall, White, & Savirani, 2021). *Pertama*, hubungan kekerabatan memungkinkan mereka untuk memiliki mesin politik dengan lebih cepat, karena sudah ada kerabat mereka yang membangunnya terlebih dahulu. *Kedua*, jalur elit didominasi oleh mereka yang memiliki posisi struktural tinggi dan memegang kendali atas keputusan strategis. *Ketiga*, koneksi elit atau dinasti berkontribusi menyumbang modal ekonomi yang kuat, karena kebanyakan dari mereka telah mapan secara finansial. Singkat kata, jalur elit dianggap sebagai rute tercepat untuk menduduki kepemimpinan politik formal bagi perempuan dengan kadar hambatan yang lebih sedikit.

Perdebatan teoritis kemudian muncul terkait dengan kandidat perempuan yang tidak memiliki koneksi dinasti atau bukan berasal dari latar belakang elit. Temuannya, hambatan dalam meraih kesuksesan pada kontestasi bisa ditembus, hanya saja akan melewati rute yang lebih panjang dan memakan proses yang tidak instan. Studi menunjukkan bahwa kandidat perempuan yang berangkat dari jalur non-elit biasanya adalah mereka para politisi akar rumput dan merupakan aktivis (Sinpeng & Savirani, 2022). Pengalaman dan aktivitas yang telah mereka tempuh dapat membentuk modal berharga, yakni jaringan.

Penelitian ini berargumen bahwa jaringan mampu menjadi pengantar bagi politisi perempuan akar rumput untuk mencapai kesuksesan dalam kontestasi politik. Ketiadaan koneksi dinasti yang menyumbang modal finansial besar serta akses struktural yang strategis dapat diatasi dengan jaringan sebagai mesin politik yang dibangun secara matang. Dengan demikian, hambatan-hambatan kontestasi dapat ditembus oleh politisi perempuan akar rumput melalui hadirnya jaringan untuk mengantarkannya menuju keterpilihan. Penelitian ini juga memperkuat studi yang berpendapat bahwa akses ke jaringan perempuan lebih menguntungkan bagi kandidat perempuan, terlebih ketika akses tersebut dikombinasikan dengan kepemilikan isu gender (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikah, 2021).

Beberapa temuan sebelumnya terkesan melupakan konsekuensi lain dari keuntungan dan percepatan lintasan yang diperoleh melalui jalur elit. Kontestasi tidak hanya selesai ketika mereka sudah terpilih. Justru tantangan besar akan muncul bagi kandidat perempuan yang berangkat dari jalur elit. Pasca kontestasi, mereka akan menghadapi tugas berat untuk merawat mesin politik, termasuk

jaringan. Studi juga melihat bahwa politisi perempuan yang berasal dari latar belakang elit menunjukkan kecenderungan yang rendah untuk melawan sistem patriarki. Keberpihakan mereka tidak selalu linear dengan suara vokal untuk menyuarakan dan mengadvokasikan isu-isu gender (Choi, 2019). Politisi dinasti lebih memanfaatkan kebijakan kuota untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga menghasilkan bentuk keterwakilan perempuan yang elitis. Sebagai konsekuensi, peluang kandidat perempuan untuk terpilih kembali cenderung menurun.

Sebaliknya, studi ini berpendapat bahwa politisi perempuan akar rumput justru lebih matang dalam merawat mesin politik, sehingga mampu meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul dalam jangka panjang. Pengalaman mereka meniti karir politik dari proses yang tidak instan akan membentuk keterampilan dalam mengelola sumber daya politik. Keterampilan ini berguna untuk merawat mesin politik yang bekerja membantu mereka, sekaligus membangun resiliensi bagi kandidat perempuan. Jaringan juga tidak harus bersifat struktural sebagaimana yang sering digunakan oleh politisi dari jalur elit, tetapi jaringan yang dibangun melalui relasi informal juga mampu mengantarkan kandidat meraih kesuksesan, seperti halnya jaringan ibu-ibu pengajian atau semacamnya. Dalam kata lain, politisi perempuan dari jalur ini akan lebih siap menghadapi *bottleneck* pertarungan politik yang dapat meningkatkan peluang untuk terpilih kembali.

Kecenderungan untuk memanfaatkan jejaring sesama perempuan atau modal homososial dalam kampanye berangkat dari keterbatasan bahwa kandidat perempuan cenderung memiliki sumber daya finansial yang sedikit dan pengaruh yang kecil pada jaringan lokal, yang seringkali digunakan untuk membangun tim

sukses serta memengaruhi calon pemilih (Aspinall, White, & Savirani, 2021). Oleh karena itu, menarget sebagian besar pemilih perempuan akan memberikan keuntungan untuk membantu kemenangan mereka, karena dalam sistem pemilihan yang diberlakukan untuk pemilihan legislatif hanya mengharuskan mereka mengumpulkan sebagian kecil suara pada setiap daerah pemilihan untuk memperoleh kursi.

Para perempuan ini memanfaatkan hubungan saling percaya dan pengertian yang muncul dalam jaringan yang berfokus pada perempuan, dengan mengandalkan jaringan tersebut untuk membangun tim kampanye mereka dan dengan memusatkan upaya kampanye mereka pada pemilih perempuan. Studi juga menemukan bahwa secara emosional, perempuan memiliki kecenderungan lebih solid bertahan pada pilihannya (Ratnasari, 2015). Perempuan akan cenderung loyal untuk memilih kandidat perempuan ketika mereka merasa bahwa ada permasalahan atau isu yang diwakilkan melalui kehadiran kandidat perempuan tersebut.

Penelitian ini mengangkat cerita sukses politisi perempuan akar rumput di Kabupaten Pemalang, yaitu Ajeng Triyani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai studi kasus. Ia telah menapaki lika-liku terjalnya kontestasi politik sejak Pemilu Legislatif Kabupaten Pemalang Tahun 2009. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam empat besar kabupaten termiskin di Jawa Tengah (BPS Jateng, 2024). Akan tetapi, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemalang merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah dengan menyentuh angka 81,57% (Triyani, 2023). Pada Pemilu 2019, representasi perempuan yang duduk di parlemen Pemalang menyentuh angka 32%. Ajeng

adalah salah satu politisi yang terpilih dan merupakan satu-satunya kandidat perempuan di Pemalang yang menduduki kursi legislatif paling lama. Bahkan, ia juga menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi pimpinan legislatif lokal sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang 2022 – 2024. Hal ini menunjukkan kapabilitas dan resiliensinya sebagai politisi perempuan.

Tabel 1.1.

**Keikutsertaan Kandidat dalam Pemilu Legislatif
di Kabupaten Pemalang**

Periode Kontestasi	Perolehan Suara	Nomor Urut	Hasil
Pileg 2009	1.700	5	Terpilih
Pileg 2014	4.224	1	Gagal
Pileg 2019	4.511	3	Terpilih
Pileg 2024	8.252	1	Terpilih

Sumber: Arsip KPU Kabupaten Pemalang

Ajeng bukanlah politisi perempuan yang berasal dari lingkaran dinasti. Ia merintis sendiri karir politiknya dari bawah dengan aktif berorganisasi sejak remaja. Daya juangnya membawa hasil yang baik ketika ia telah memantapkan diri untuk menapaki jalur politik formal. Walau sempat gagal terpilih pada Pemilu 2014, tetapi tren perolehan suaranya selalu naik signifikan dan tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali berkompetisi. Ia justru tetap aktif di lingkungan partai dan kultural Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengembangkan modal sosial politiknya. Kenaikan suara yang didapat oleh Ajeng menandakan bahwa mesin politik, terutama jaringan pemenangannya, benar-benar dirawat dan mampu bekerja, meskipun tidak selalu

diikuti dengan hasil akhir berupa keterpilihan. Jumlah suara yang naik juga menandakan meluasnya basis pemilih dan terbangunnya kepercayaan dari konstituen untuk tetap memilihnya dari pemilu ke pemilu.

Kisah Ajeng yang diangkat dalam penelitian ini mengisi celah studi sebelumnya yang belum memberi perhatian khusus pada proses membangun dan merawat jaringan, terutama yang digunakan oleh politisi perempuan akar rumput untuk memenangkan kontestasinya. Studi sebelumnya masih sebatas membahas tentang bagaimana jaringan tersebut digunakan untuk menarget suara pemilih (Muzadi & Fitriyah, 2020), terfokus pada satu kali masa kontestasi (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021), dan belum memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana dinamika di balik prosesnya (Swarizona & Raffiudin, 2021). Jaringan menjadi sumber modalitas yang penting, karena perannya dapat mengisi ketiadaan aspek-aspek struktural maupun kendala finansial yang lebih banyak dimiliki oleh kandidat elit. Penelitian ini turut membuktikan bahwa kemapanan jaringan yang dibangun dalam proses panjang memberi hasil optimal dalam meminimalisir hambatan dan membuka ruang keterpilihan secara lebih besar bagi politisi perempuan akar rumput.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politisi perempuan akar rumput membangun dan merawat jaringan pemenangan dalam konteks Pemilihan Legislatif Kabupaten Pemalang?

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam membangun dan merawat jaringan pemenangan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pendekatan dan upaya yang diaplikasikan oleh politisi perempuan akar rumput untuk membangun dan merawat jaringan pemenangan.
2. Mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam membangun dan merawat jaringan pemenangan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Studi ini memperkaya temuan tentang keterpilihan kandidat perempuan, terutama yang berasal dari lingkup akar rumput atau jalur non-elit. Di samping itu, temuan penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif baru terkait peran penting jaringan bagi keterpilihan kandidat perempuan. Secara mendalam, penelitian ini menguraikan analisis yang lebih spesifik tentang bagaimana kandidat perempuan akar rumput mampu membangun sekaligus merawat jaringan pemenangannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi membuka ruang yang semakin luas bagi politisi perempuan untuk terpilih dalam kontestasi politik. Studi ini memberikan motivasi dan harapan adanya peluang bagi perempuan akar rumput atau non-elit untuk bisa bersaing di arena politik, dengan membangun modalitas dan mesin politiknya sejak dini. Mereka adalah pesan sekaligus gambaran bagi representasi perempuan yang lebih substantif di kemudian hari.

1.5. Tinjauan Pustaka

Studi ini melihat adanya celah teoritis dalam pembahasan mengenai jaringan dan keterpilihan kandidat perempuan, utamanya dalam konteks politisi perempuan akar rumput. Analisis tentang bagaimana upaya sekaligus strategi mereka membangun dan merawat jaringan menjadi sesuatu yang luput dibahas (Andriana, 2012; Wardani & Subekti, 2021). Keterpilihan kandidat perempuan sejatinya adalah hasil makro yang di dalamnya penuh dengan berbagai dinamika elemen mikro, termasuk jaringan.

Studi tentang jaringan dalam pemilu disebutkan sebagai konsep yang melekat pada modal sosial (Aspinall & Berenschot, 2019). Definisi ini berangkat dari pandangan Robert Putnam (1993) yang menyebutkan bahwa jaringan berdiri dengan elemen lain seperti norma dan kepercayaan, yang selanjutnya dapat memfasilitasi suatu tindakan untuk memperoleh efisiensi atau keuntungan dalam masyarakat. Konsep ini kemudian banyak dipakai oleh beberapa peneliti di sejumlah literatur. Misalnya, dalam konteks pemilu di Indonesia, jaringan ditempatkan pada bagian sub-analisis sebagai salah satu aspek yang turut

mengonstruksi modal sosial dan berperan bagi kemenangan atau keterpilihan kandidat saat bertarung pada pemilu (Firmansyah & Faradhila, 2022; Wungu, 2022; Putri, 2017; Lagabuana, Sukri, & Haryanto, 2021).

Sedikit penelitian yang melihat jaringan sebagai konsep tersendiri untuk dianalisis dalam keterkaitannya dengan kontestasi elektoral. Padahal, temuan mencatat bahwa saat berkembang, jaringan merupakan pisau analisis dan “teknologi” dari modal sosial itu sendiri, sedangkan persoalan kritisnya terletak pada kinerja (Burt, 2000). Definisi ini cukup kuat untuk menempatkan jaringan sebagai konsep yang dapat berdiri sendiri, tidak selalu ditempatkan sebagai sub-analisis dari modal sosial. Maka, hal ini sejalan dengan argumen penelitian ini yang mengungkapkan bahwa jaringan, tak terkecuali jaringan perempuan, dapat menjadi alat untuk meminimalisir besarnya hambatan bagi kandidat perempuan dalam berkontestasi. Terutama bagi mereka, para politisi perempuan akar rumput yang memiliki jalur politik lebih panjang dan dinding hambatan lebih tebal.

Temuan lain mencatat ketika analisis jaringan pada kandidat perempuan ditempatkan sebagai sub dari modal sosial adalah banyak studi yang hasilnya cenderung kurang menggembirakan bagi representasi perempuan secara substantif (Kabullah & Fajri, 2021; Dalupe, 2020). Persoalan jaringan dalam modal sosial erat kaitannya dengan *trust* atau rasa percaya. Struktur sosial yang masih menempatkan perempuan pada posisi kelas dua mengakibatkan unsur *trust* atau rasa percaya lebih tinggi disematkan kepada kandidat laki-laki. Persoalan kultural dan institusional saling berkaitan satu sama lain. Sebagai konsekuensi, politisi perempuan mengalami interdependensi dengan figur laki-laki seperti suami, ayah, kakak, adik,

maupun kerabat laki-laki lainnya yang kebanyakan memonopoli sumber daya politik. Tak jarang, polanya akan melahirkan relasi yang bersifat klientelistik. Misalnya, studi Kabullah & Fajri (2021) memotret adanya fenomena neo-ibuisme di Sumatera Barat. Mereka bisa aktif di ranah publik, tetapi tidak melepaskan stereotip peran tradisional mereka sebagai seorang ibu yang dibalut dalam isu kampanye, ditambah dengan mobilisasi sumber daya dari suami atau kerabat laki-lakinya. Fenomena berulang yang terjadi adalah kandidat perempuan yang terpilih di kursi parlemen nasional dari daerah pemilihan tersebut merupakan istri atau anak dari kepala daerah dan pejabat setempat. Sama halnya dengan studi Dalupe (2020) di NTT, Pemilu 2019 menyajikan hasil terpilihnya kandidat perempuan yang ditopang oleh nama besar ayahnya sebagai seorang pejabat.

Temuan-temuan di atas kemudian berkorelasi dalam memunculkan dikotomi yang berbeda antara politisi perempuan yang berasal dari latar belakang elit dan non-elit (Aspinall, White, & Savirani, 2021; Choi, 2019; Bjarnegard & Kenny, 2016; Savirani, 2024). Latar belakang tersebut pada akhirnya turut menentukan panjang pendeknya jalur yang harus mereka tempuh untuk sampai pada kepemimpinan politik. Politisi perempuan dari jalur atau lintasan elit diidentikkan dengan mereka yang telah mempunyai kemapanan sumber daya politik, terutama ditopang oleh lingkaran kerabat dinasti yang mereka miliki. Mereka dihadapkan dengan hambatan yang lebih sedikit. Sedangkan politisi perempuan dari jalur non-elit, sering disebut juga sebagai politisi perempuan akar rumput, adalah mereka yang menapaki dan membangun karir politiknya sendiri dari bawah. Tentu saja, hambatan yang harus mereka tembus lebih beragam.

Panjangnya jalur dan tebalnya hambatan yang harus ditempuh oleh politisi perempuan akar rumput muncul dari akses dan sumber daya yang tidak setara (Choi, 2019; Aspinall, White, & Savirani, 2021). Politisi perempuan elit rata-rata lebih tertarik untuk mewarisi kekuasaan politik karena mereka sering dianggap tidak ambisius secara politik dan pandai menjaga keutuhan keluarga. Mereka memulai karir politik ketika lingkungan pribadi mereka kondusif. Ketidaksetaraan akses dan perbedaan kepemilikan sumber daya menyebabkan politisi perempuan akar rumput harus merintis dan membangun sendiri segala bentuk amunisi untuk menapaki lintasan-lintasan politik. Bahkan, sebelum memulai sepak terjang politik, mereka sudah dihadapkan dengan hambatan-hambatan pra-kontestasi. Urusan untuk bisa menunjukkan eksistensi dirinya terlebih dahulu adalah tugas utama (Suryakusuma, 2021). Sebab, perempuan yang berangkat dari jalur akar rumput mesti siap secara pribadi. Sudah menjadi hal yang niscaya bahwa mereka juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami atau keluarganya (Elizabeth, 2019). Restu menjadi aspek yang penting bagi kelancaran langkah mereka agar sekurang-kurangnya memiliki dukungan moril.

Banyak studi yang sepakat bahwa kandidat perempuan dari jalur elit lebih mudah mencapai keterpilihan (Wardani & Subekti, 2021; Choi, 2019; Andriana, 2012). Banyaknya kandidat perempuan yang berkompetisi dengan jalur elit atau latar belakang dinasti dapat ditelisik dari pragmatismenya partai politik. Kebanyakan elit partai lebih memilih untuk mencalonkan kerabat perempuan mereka sebagai syarat memenuhi kuota gender dibandingkan melakukan seleksi secara *fair* melalui struktural partai. Hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya kandidat perempuan yang

memiliki sumber daya keuangan memadai untuk mendukung biaya kampanye yang mahal dan membayar dukungan untuk kelancaran kompetisi mereka saat bergulat dengan politisi lain.

Namun, bukan hal yang mustahil juga bagi kandidat perempuan dari jalur non-elit untuk bisa memenangkan kontestasi politik (Bayo, 2021; Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021; Swarizona & Raffiudin, 2021; Lagabuana, Sukri, & Haryanto, 2021; Muzadi & Fitriyah, 2020). Beberapa temuan ini turut menggambarkan ada peran jaringan di dalamnya yang berkontribusi pada kemenangan kandidat. Dalam konteks Indonesia, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi alternatif untuk menjangkau massa ketika mesin politik formal seperti partai politik tidak dapat menjalankan tugas serupa dengan maksimal. Lebih spesifik, akses ke jaringan perempuan dapat memberikan keuntungan bagi kandidat perempuan ketika dikombinasikan dengan strategi kepemilikan isu gender (Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah, 2021). Temuan tersebut diperkuat dengan realita masih lekatnya budaya patriarki di masyarakat, sehingga diperlukan jaringan sebagai agen sosialisasi yang dapat mereduksi hambatan akses tersebut. Studi Muzadi & Fitriyah (2020) memotret lanskap yang sama tentang peranan jaringan yang mampu mengantarkan kandidat perempuan meraih kemenangan, bahkan *hattrick* sebagai anggota legislatif.

Perlu dicatat bahwa meskipun mereka tidak berangkat dari jalur non-elit, tetapi ada posisi struktural yang telah melekat. Dalam studi Mahsun, Elizabeth, & Mufrikhah (2021) serta Swarizona & Raffiudin (2021), politisi perempuan non elit yang berhasil menembus kontestasi memiliki latar belakang posisi struktural tinggi

di Jaringan kultural Nahdlatul Ulama (NU), seperti Fatayat dan Muslimat. Adapun studi Bayo (2021), Lagabuana, Sukri, & Haryanto (2021), serta Muzadi & Fitriyah (2020), mencatat bahwa mereka yang terpilih merupakan politisi perempuan dengan posisi struktural partai yang cukup mentereng. Artinya, keterpilihan mereka dapat disebabkan oleh pengaruh dominasi yang berasal dari hierarki atau derajat struktural, sehingga mampu mengikat ketaatan bagi para pengikutnya. Studi-studi tersebut juga belum memberikan gambaran secara lebih detail tentang dinamika yang terjadi antara kandidat perempuan dan jaringan dalam rentang waktu kontestasi yang lebih dari satu periode.

Penelitian ini menyuguhkan sudut pandang yang berbeda. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini dapat memperkaya perspektif tentang politisi perempuan akar rumput yang tidak harus memiliki posisi struktural tinggi untuk dapat menduduki kursi kepemimpinan politik. Sepak terjang Ajeng Triyani sebagai politisi perempuan di Kabupaten Pematang Jaya dari Pemilu Legislatif 2009 – 2024 menggambarkan kegigihannya menapaki lintasan atau jalur politik non-elit. Tren perolehan suaranya yang selalu naik dari waktu ke waktu menandakan keberhasilannya membangun dan merawat jaringan dalam konteks kemenangan politik.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. *Social Network* dan Konsep Jaringan Pemenangan Kandidat Perempuan

Jaringan sosial atau *social network* dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki pola-pola tertentu dalam interaksi mereka dan

relasi yang mendasarinya adalah hubungan sosial (Newman, 2003). Menyadur definisi ini, maka jaringan sosial memiliki kompleksitas elemen pembentuk seperti aktor, arus informasi, dan relasi yang terbangun (Wasserman & Faust, 1994; Eriyanto, 2014). Di samping itu, kekhasan yang ada pada teori jaringan secara lebih luas adalah cakupan perhatian yang luas, baik pada aspek mikro maupun makro. Artinya, elemen-elemen pembentuk jaringan di sini dapat berasal dari struktur sosial yang paling kecil hingga paling besar (Ritzer & Goodman, 2004). Jaringan sosial bukan hanya berbicara tentang individu dan kelompok, melainkan juga lingkup yang lebih luas seperti organisasi, masyarakat, dan negara. Cakupan yang luas dalam studi jaringan menjadikannya dapat digunakan pada berbagai dimensi analisis, seperti dalam hubungan interpersonal, politik, ekonomi, maupun bentuk-bentuk hubungan sosial lainnya (Laily, 2020).

Beberapa prinsip logis yang menjadi ciri dari teori jaringan meliputi hal-hal sebagai berikut (Ritzer & Goodman, 2004):

- a. Relasi yang terbangun antar aktor cenderung bersifat simetris dalam tingkatan dan intensitasnya
- b. Analisis hubungan antar individu dilakukan dalam tataran struktur jaringan yang lebih luas
- c. Struktur ikatan sosial menghasilkan berbagai tipe jaringan yang tidak bersifat acak
- d. Keberadaan kelompok jaringan menciptakan interaksi yang kompleks, baik di antara individu maupun kelompok

- e. Terdapat hubungan asimetris antara elemen dalam suatu sistem jaringan, yang berakibat pada tidak meratanya distribusi sumber daya yang terbatas
- f. Distribusi sumber daya yang terbatas dapat memicu terjadinya kerjasama maupun persaingan di antara individu atau kelompok

Para ahli sependapat bahwa dalam membaca analisis jaringan, perspektif struktural lebih dapat menangkap fenomena yang komprehensif dibandingkan dengan penjelasan normatif tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku (Laily, 2020). Kolektivitas adalah unsur yang penting dipahami dalam jaringan. Hal ini didasari oleh gagasan bahwa individu maupun kelompok yang berperan sebagai aktor dalam jaringan mempunyai akses yang tidak seragam terhadap sumber daya penting seperti informasi, *power*, dan kekayaan. Sebagai konsekuensi, stratifikasi terbentuk dalam struktur, sehingga antara satu komponen dengan komponen lainnya saling bergantung. Ketergantungan ini membentuk relasi yang sifatnya resiprokal atau timbal balik.

Jaringan sosial terbentuk dari proses hubungan sosial yang umumnya telah berjalan relatif lama dan terdapat unsur kesamaan harapan yang mengikat anggotanya (Agusyanto, 2007). Hubungan sosial sebagaimana yang dimaksud dapat bersifat formal maupun informal. Dalam satu literatur, keterikatan semacam ini disebut sebagai *membership group*, yakni merujuk pada keanggotaan individu secara fisik dalam suatu kelompok (Soekanto, 2006). Hubungan sosial dapat dianalogikan sebagai jalur yang membangun keterhubungan antar aktor. Di dalam jalur tersebut dapat terjadi aliran arus sumber daya, baik itu informasi, barang, ataupun jasa. Setiap aktor yang menjadi bagian jaringan sosial memiliki

pengharapan peran pada aktor lainnya. Perilaku aktor tercermin dalam interaksi yang sistematis, walaupun tidak semua anggota menyadarinya. Jaringan sosial dapat berkembang dari terjalinnya hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial memainkan peran yang penting untuk mendorong manusia mencapai tujuannya. Oleh karena itu, jaringan sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana mencapai tujuan tertentu, dengan penyesuaian pada konteks ruang, waktu, serta dinamika sosial yang terjadi.

Berdasarkan tujuannya, jaringan sosial dibedakan menjadi jaringan kepentingan (*interest*), jaringan kekuatan (*power*), dan jaringan emosi (*sentiment*). Jaringan emosi cenderung membentuk struktur sosial yang lebih mantap dan permanen, karena melibatkan egosentrisme pribadi yang selanjutnya membentuk rasa primordial dalam kelompok. Jaringan kekuatan memiliki tingkat kemantapan sedang. Fokus utamanya adalah membentuk pengendalian kepada unsur-unsur yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan strategis. Lain halnya dengan jaringan kepentingan. Mereka cenderung bersifat sementara, bergantung jenis kepentingan yang membangun kesepakatan antar aktor.

Sehubungan dengan kontestasi politik, jaringan sosial dapat bertransformasi menjadi jaringan kemenangan. Mereka adalah salah satu jenis jaringan sosial yang terbentuk berdasarkan *interest* atau kepentingan untuk memenangkan kandidat tertentu. Keterkaitan pembahasan tentang jaringan yang diidentikkan dengan modal sosial dapat dipahami dari logika bahwa sejauh jaringan tersebut mampu menjadi sumber daya, maka ia dapat dipandang sebagai modal (Laily, 2020). Struktur sosial adalah sejenis modal yang dapat menciptakan

keunggulan kompetitif bagi individu atau kelompok tertentu dalam mengejar tujuan mereka. Orang yang terhubung secara lebih baik dapat menikmati hasil yang lebih tinggi. Hasil tersebut bisa dicapai dari kepercayaan yang telah terbangun (Biggart, 2000), kewajiban balas jasa yang timbul (Aspinall & As'ad, 2015), atau kecakapan yang lebih matang karena memiliki kemampuan berjejaring secara lebih baik (Burt, 2000). Jaringan dapat menjembatani kandidat untuk terhubung dengan calon pemilih atau konstituen mereka (Aspinall & Berenschot, 2019).

Individu atau sekelompok orang yang biasanya diintegrasikan dalam jaringan pemenangan adalah mereka yang memiliki lingkaran koneksi luas dan pengetahuan mendalam tentang komunitas lokal, berpengaruh dalam komunitas itu, dan biasanya mempunyai atribusi sebagai pemimpin formal maupun jaringan sosial informal yang anggotanya dapat ditarik ke dalam tim kampanye (Aspinall, 2014). Karakteristik ini diberlakukan dengan rasionalisasi tidak hanya untuk mempermudah praktik bujukan moral secara umum, tetapi juga “memperkuat norma kewajiban timbal balik”. Mereka yang memiliki pemahaman mendalam seputar komunitas setempat dinilai mampu menerjemahkan persoalan sehari-hari masyarakat menjadi potensi suara yang dapat dikonversi pada saat hari pemilihan tiba. Kandidat membutuhkan jaringan untuk menjangkau pemilih yang sedemikian rupa banyaknya. Nantinya, pembacaan mereka terhadap situasi masyarakat berkontribusi pada perumusan formulasi yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada konstituen.

Jaringan perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat dan utamanya bagi kandidat perempuan saat berkontestasi

(Alfirdaus & Nugroho, 2022). Stereotip yang memandang perempuan lebih inferior dibanding laki-laki turut berakibat pada munculnya perspektif yang memandang rendah mereka untuk berkontestasi. Jaringan perempuan yang di dalamnya terdapat solidaritas gender dapat membantu kandidat perempuan untuk mereduksi hambatan-hambatan struktural dan kultural. Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaksana atau pendukung kebijakan program-program pemerintah di tingkat lokal, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan. Dalam konteks ini, jaringan dan para aktivis perempuan berperan sebagai jembatan antara masyarakat, terutama kaum perempuan, dengan para pemangku kepentingan lainnya. Peran mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena mereka memahami kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dan mampu menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak berwenang dalam berbagai bentuk.

Salah satu alasan mengapa peran mereka begitu signifikan adalah jaringan sosial yang mereka bangun dalam komunitas. Aktivis perempuan biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan anggota masyarakat lainnya, terutama perempuan. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program-program tertentu, seperti program kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi, yang semuanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mereka juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal, yang membuat

mereka mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang relevan dan tepat sasaran.

Menjelang pemilihan umum, partai politik dan calon anggota legislatif sering kali memanfaatkan pengaruh dan jaringan aktivis perempuan ini untuk membantu mereka menggalang dukungan politik. Karena para aktivis memiliki hubungan yang erat dengan komunitas mereka, partai politik maupun kandidat melihat mereka sebagai aset berharga dalam meraih suara, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kampanye politik biasa. Aktivis perempuan sering diminta untuk menjadi bagian dari tim kampanye karena kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan dan menarik dukungan dari masyarakat setempat. Mereka biasanya diandalkan untuk berkomunikasi dengan komunitas tetangga dan menggalang dukungan politik dari kelompok-kelompok yang kurang terlibat secara langsung dalam politik formal.

Reyes-Housholder (2018) dalam Alfirdaus & Nugroho (2022) menyatakan bahwa keberhasilan dalam menarik dukungan pemilih perempuan sangat bergantung pada keterlibatan perempuan dalam tim kampanye. Ia mengemukakan konsep "mobilisasi gender strategis," yang menekankan bahwa perempuan memiliki keunggulan dibandingkan laki-laki dalam memobilisasi pemilih perempuan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kandidat perempuan yang bersaing untuk jabatan eksekutif dan legislatif biasanya mengikuti tiga tahapan dalam strategi kampanye mereka.

Tahapan pertama adalah membangun solidaritas gender dengan mendekati sesama perempuan sejak awal kampanye. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa persatuan di antara pemilih perempuan. Kedua, kandidat perempuan memanfaatkan pengalaman gender mereka, baik sebagai ibu atau sebagai individu yang pernah mengalami diskriminasi, untuk membangun hubungan emosional dengan pemilih perempuan. Pada tahap ini, isu-isu yang sering menjadi perhatian perempuan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pendidikan anak, dan ketidaksetaraan upah, diangkat sebagai fokus utama kampanye. Mengangkat isu-isu ini menunjukkan kepada pemilih perempuan bahwa kandidat memahami dan peduli terhadap persoalan yang mereka hadapi. Tahap ketiga adalah mengandalkan kesamaan identitas gender untuk menjanjikan kebijakan yang mendukung perempuan. Janji reformasi ini menjadi bagian dari kampanye, sehingga memberikan harapan bahwa kepentingan perempuan akan diutamakan dalam pembuatan kebijakan jika mereka terpilih.

Namun sayangnya, tidak semua jaringan perempuan terlembagakan secara formal meskipun perannya signifikan. Persoalan yang kemudian muncul adalah jaringan pemenangan yang terbentuk dari relasi informal sering kali bersifat *ad hoc*, karena tidak ada aturan yang mengikat mereka secara resmi (Aspinall & Berenschot, 2019). Berbeda dengan jaringan formal, seperti mesin politik dari partai misalnya, karena mereka telah memiliki sistem yang lebih mapan dan aturan yang terstruktur. Maka dalam konteks mobilisasi jaringan untuk periode kontestasi yang berbeda, petahana juga harus mengorganisir ulang tim pemenangannya. Tidak jarang mereka akan memasukkan orang-orang lama ke dalam jaringan

pemenangan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa orang-orang tersebut akan bertahan setelah pemilihan usai. Kebanyakan dari mereka akan bertahan ketika imbalan dan perlakuan yang mereka dapatkan dari kandidat bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjaga jaringan pemenangan memerlukan keterampilan berjejaring.

1.6.2. Pendekatan dalam Membangun dan Merawat Jaringan Pemenangan

Jaringan pemenangan dibangun dan dipertahankan dengan pola yang beragam. Pemaknaan tentang konsep jaringan memberikan gambaran yang penting dalam menentukan pendekatan dan strategi yang akan digunakan. Secara teoritis, jaringan sering dilekatkan dengan teori modal sosial (Putnam, 2000). Modal sosial dimaknai sebagai kumpulan hubungan horizontal antara individu-individu dalam masyarakat. Modal sosial ini terbentuk dari "jaringan keterlibatan sipil," yaitu jaringan interaksi sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan tingkat produktivitas suatu kelompok atau komunitas. Konsep modal sosial didasarkan pada dua asumsi utama: pertama, adanya jaringan hubungan sosial yang terstruktur; dan kedua, norma-norma yang mengatur interaksi dalam jaringan tersebut (Syahra, 2003).

Klasifikasi modal sosial menurut Putnam (2000) dapat digunakan sebagai konsep untuk menganalisis pendekatan dalam membangun jaringan pemenangan. Dalam karya bersejarahinya dengan judul *Bowling Alone*, Robert Putnam mengklasifikasikan modal sosial menjadi dua jenis, yaitu modal sosial pengikatan (*bonding social capital*) dan modal sosial penjembatan (*bridging social capital*). Modal sosial pengikatan merujuk pada ikatan sosial yang terdapat dalam kelompok

atau komunitas yang homogen, di mana anggotanya memiliki hubungan erat berdasarkan persamaan ideologi dan personal yang kuat. Namun, modal sosial ini bersifat eksklusif, karena cenderung membatasi interaksi hanya dalam kelompoknya sendiri dan memandang orang di luar kelompok sebagai pihak luar. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial yang bersifat universal.

Sebaliknya, modal sosial pen jembatanan lebih inklusif dan mencakup hubungan sosial yang melintasi berbagai latar belakang, seperti agama, pendidikan, ras, dan ideologi (Santoso, 2020). Jenis modal sosial ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kelompok yang berbeda, sehingga memperluas jaringan sosial mereka. Menurut Putnam (2000), modal sosial pen jembatanan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang lebih luas dan membuka peluang yang lebih besar bagi kesejahteraan individu. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat modal sosial jenis ini melalui pembentukan asosiasi yang lintas batas, seperti lintas agama dan lintas komunitas, untuk mendorong hubungan sosial yang inklusif dan produktif.

Selain dua klasifikasi di atas, perkembangan pembahasan tentang modal sosial menciptakan tipe ketiga berjenis jaringan sosial penghubung (*linking social capital*). Tipe ini merujuk pada hubungan yang terjadi antara individu atau kelompok dari berbagai tingkat kekuasaan atau otoritas (Chetty, 2022). Berbeda dari modal sosial pengikatan (*bonding social capital*), yang menghubungkan orang-orang dalam kelompok yang homogen, dan modal sosial pen jembatanan (*bridging social capital*), yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda namun sejajar secara sosial, modal sosial penghubung (*linking social capital*) fokus pada

hubungan vertikal yang melibatkan kekuatan, status, atau sumber daya yang tidak setara. Modal sosial penghubung sangat penting dalam menciptakan akses ke sumber daya dan peluang bagi kelompok masyarakat yang lebih lemah atau posisi lebih rendah, karena memungkinkan hubungan dengan individu atau institusi yang memiliki pengaruh atau kekuasaan lebih besar.

Tabel 1.2.

Tipologi Pendekatan dalam Membangun Jaringan

Jenis	Karakteristik Utama	Tujuan	Indikator Umum
<i>Bonding Social Capital</i>	Bersifat homogen dan eksklusif	Menguatkan solidaritas internal	• Frekuensi interaksi dalam kelompok cenderung tinggi, namun lingkup kelompoknya kecil • Terbangun tingkat kepercayaan yang kuat antarsesama anggota • Berlaku norma dan sanksi sosial internal yang bersifat informal • Ada kegiatan bersama rutin (misal: pengajian, arisan, gotong royong)
<i>Bridging Social Capital</i>	Bersifat heterogen, inklusif, cenderung sejajar	Membangun inklusi sosial dan memperluas jejaring	• Keterlibatan dalam organisasi lintas komunitas • Kegiatan kolaboratif antar kelompok berbeda • Tingkat toleransi dan keterbukaan sosial • Memungkinkan munculnya forum lintas identitas
<i>Linking Social Capital</i>	Bersifat heterogen dan vertikal	Mengakses sumber daya dan	• Hubungan dengan tokoh-tokoh penting atau petinggi (baik

		dukungan struktural	dalam lingkup sosial, politik, maupun ekonomi) • Akses terhadap program atau bantuan formal • Representasi dalam proses pengambilan kebijakan • Kedekatan dengan aktor elit atau instusional
--	--	---------------------	---

Sumber: Diolah dari Putnam (2000)

Berikutnya, strategi merawat jaringan dapat mengadopsi konsep yang berangkat dari diskusi tentang pandangan berbeda mengenai struktur jaringan pembentuk modal sosial. Diskusi dimulai dari metafora konkrit bahwa arti “terhubung lebih baik” sangat ambigu (Burt, 2000). Koneksi antar aktor mesti didasarkan pada sejarah dan peristiwa-peristiwa sosial yang telah dilalui. Orang-orang tertentu kadangkala mencari orang lain yang spesifik untuk berjejaring. Sebagian lainnya kadangkala telah menyelesaikan pertukaran satu sama lain secara insidental. Dalam kata lain, setiap jaringan menghubungkan individu atau kelompok secara bervariasi sebagai fungsi dari kontak sebelumnya, pertukaran, dan emosi yang menyertai. Keragaman itu melahirkan tingkat kepadatan jaringan yang berbeda. Residu jaringan sebelumnya secara teoritis belum tentu relevan dengan perilaku pasar atau permintaan masyarakat besok. Jika dikaitkan dengan konteks pemilu, maka menjadi tepat bila jaringan pemenangan sangat banyak yang bersifat sementara. Artinya, kepiawaian kandidat untuk merawat jaringan sangat diuji. Pemilu juga sarat akan berbagai dinamika politik yang seringkali sulit diprediksi sebelumnya.

Burt (2000) mencetuskan konsep *network models of range* (model jaringan jangkauan). Model ini dibagi lagi menjadi *closure* (penutup) dan *brokerage* (perantara). Kedua mekanisme dimulai dengan asumsi bahwa komunikasi membutuhkan waktu, sehingga hubungan sebelumnya memengaruhi siapa yang mengetahui informasi lebih awal. Model *closure* disebut juga dengan jaringan yang padat. *Closure* melakukan dua hal untuk orang-orang di jaringan tertutup. Pertama, meningkatkan komunikasi. Kedua, Jaringan yang padat memfasilitasi kepercayaan dan norma dengan sanksi yang efektif. Ancaman sanksi membuat kepercayaan lebih mungkin terbangun antara orang-orang yang memiliki keterikatan struktural. Adapun keunggulan model *brokerage* adalah berkaitan dengan akses informasi dan kontrol. *Brokerage* mencapai volume informasi yang lebih tinggi karena menjangkau lebih banyak orang secara tidak langsung. Koneksi yang luas lebih memungkinkan aktor menjadi kandidat yang dibahas untuk dimasukkan dalam peluang baru.

Di antara pembahasan *closure* dan *brokerage*, terdapat *structural holes* atau lubang struktural sebagai celah untuk memainkan pendekatan atau strategi dalam berjejaring. *Structural holes* dengan demikian merupakan kesempatan untuk menengahi arus informasi di antara orang-orang dan mengendalikan proyek yang menyatukan orang-orang dari sisi yang berlawanan. Keterampilan untuk mengatasi *structural holes* akan membangun keterhubungan jaringan yang dapat mengukur sejauh mana seseorang menengahi hubungan tidak langsung antara aktor-aktor dalam suatu jaringan. Dalam posisi untuk menyatukan koneksi, upaya dalam merawat jaringan dapat diklasifikasikan menjadi:

a. *Tertius Gaudens*

Pendekatan ini menyebut pihak ketiga sebagai pihak yang diuntungkan atau dalam istilah asli merujuk pada *the third who benefits* (Burt, 1992). Dengan pendekatan ini, seseorang berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang belum terhubung untuk meraih keuntungan pribadi. Proses ini dimulai dari adanya celah struktural yang tidak terhubung, kemudian aktor mengeksplorasi peluang di antara pihak yang bersedia bernegosiasi, asalkan sumber daya mereka sebanding (Kent, Sommerdfelt, & Saffer, 2016). Namun, negosiasi tidak akan berhasil jika peran aktor tersebut diabaikan. Identitas mitra sengaja disamarkan agar perantara dapat memaksimalkan manfaat. Dengan demikian, *tertius gaudens* mencerminkan situasi yang di dalamnya terdapat potensi konflik, namun dianggap sebagai peluang untuk meraih keuntungan.

b. *Tertius Iungens*

Gagasan inti dari *tertius iungens* tidak menolak premis *tertius gaudens* yang menyatakan bahwa dibutuhkan pihak penghubung di antara para aktor karena adanya *structural holes*, dan bahwa hal ini menguntungkan pembentukan jaringan. Namun, studi Obstfeld (2005) menunjukkan perbedaan karakter dari keduanya. Sementara *tertius gaudens* mendapat keuntungan sebagai pihak ketiga, *tertius iungens* berfokus pada penghubungan jaringan dengan manfaat yang saling menguntungkan. Pendekatan *tertius iungens* lebih menekankan kerjasama dan kolaborasi daripada kompetisi, serta dapat memodernisasi aliran informasi dalam jaringan untuk memfasilitasi keberjalanan arus sumber daya secara lebih efektif (Llopis, D'Este, & Diaz-Faes, 2021).

c. Model kolaborasi

Pendekatan ini menjelaskan bahwa strategi *tertius gaudens* dan *tertius iungens* tidak bersifat eksklusif. Setiap aktor dapat menggunakan opsi strategi ini bersamaan maupun bergantian secara fleksibel. Ahli berpendapat bahwa kombinasi kedua strategi ini dapat menghasilkan titik optimum (Lingo & O'Mahony, 2010). Dalam proses kerja kreatif, aktor melewati empat fase berbeda. Pada fase pertama, aktor mengadopsi pendekatan *tertius iungens* untuk membangun jaringan dan legitimasi proyek. Di fase berikutnya, kedua strategi dimainkan bersamaan untuk menyatukan semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan berbagai aturan yang harus diikuti. Pada fase ketiga, pendekatan *tertius gaudens* lebih dominan untuk mengurangi ambiguitas dalam pengaturan medan kerja dan memperjelas arah. Akhirnya, pada tahap sintesis, arus informasi diperluas dengan menggunakan strategi *tertius iungens* agar beragam perspektif dapat diakomodasi secara lebih menyeluruh. Potret kerja kreatif yang diuraikan sebagai analogi memperlihatkan bahwa *tertius gaudens* berfungsi untuk mengurangi ambiguitas, sementara *tertius iungens* dipakai untuk menciptakan keselarasan.

1.6.3. Jaringan Pemenangan dan Trikotomi Jalur Politik Perempuan

Mobilisasi jaringan kemenangan dalam kontestasi politik turut dipengaruhi oleh kapasitas aktor yang mengoperasikan. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan memiliki hambatan kontestasi yang lebih beragam. Bahkan, saat disandingkan dengan sesama kandidat perempuan pun ternyata hambatan itu masih tetap mengiringi. Hal ini berangkat dari perspektif interseksi yang melihat bahwa ketimpangan gender tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan kelas sebagai

tantangan struktural (Savirani, 2024). Faktor kelas masih membayangi kemajuan hak dan kepentingan perempuan. Perubahan kelembagaan yang dirancang untuk mengatasi tantangan struktural, seperti sistem pemilu dan kurangnya dukungan partai, merupakan hal yang penting, namun tidak menghilangkan hambatan bagi perempuan untuk memasuki jabatan politik.

Tantangan lain yang bersumber dari aspek kultural, seperti norma dan sikap patriarki, semakin memperkuat sub-ordinasi perempuan dalam politik. Ikatan kekeluargaan telah memainkan peran penting dalam jalur politik perempuan, dan sering kali mengorbankan kemampuan mereka untuk menjadi wakil yang merepresentasikan isu gender secara efektif dan substantif (Veneracion-Rallonza, 2008). Selain itu, hanya sedikit perempuan yang memiliki sumber daya dan modal politik yang cukup untuk mencalonkan diri dalam kontestasi yang berbiaya tinggi. Perbedaan latar belakang dan tantangan-tantangan yang menyertai perempuan pada akhirnya menentukan jalur yang mereka tempuh untuk memasuki arena kontestasi politik.

Dalam kaitannya dengan jaringan kemenangan, disparitas jalur politik yang ditempuh perempuan dengan kadar dan jenis hambatan yang berbeda akan menentukan tantangan-tantangan yang harus dihadapi pada saat membangun dan merawat jaringan tersebut. Tantangan muncul sebagai konsekuensi yang harus dihadapi karena kandidat perempuan dilekatkan dengan stigma lebih inferior daripada laki-laki (Fakih, 2022). Di samping itu, mereka menghadapi konsekuensi tambahan untuk berkompetisi dengan sesama perempuan yang berangkat dari latar belakang berbeda. Perbedaan tersebut berpengaruh besar dalam menempatkan

mereka di titik awal untuk masuk dalam proses-proses politik. Titik awal itulah yang disebut sebagai jalur politik perempuan.

Jalur politik adalah mekanisme yang digunakan perempuan untuk memutuskan meraih jabatan dan kekuasaan politik, menjajaki pilihan-pilihan, memobilisasi sumber daya, mengembangkan jaringan atau hubungan dengan konstituen, serta membangun gaya politik yang berbeda (Choi, 2019). Jalur politik perempuan juga dibentuk oleh cara mereka meraih dan memenangkan jabatan politik, karena sumber modal politik dan strategi elektoral yang digunakan oleh kandidat perempuan dapat berdampak pada makna dan praktik keterwakilan politik mereka. Proses perubahan politik, kelembagaan, dan budaya dalam skala besar telah memengaruhi kondisi serta hasil tentang upaya perempuan untuk menduduki jabatan politik. Dalam hal ini, jalur politik dapat digunakan sebagai navigasi rute kemenangan bagi politisi perempuan dan membaca modalitas dengan melibatkan perspektif gender.

Nankyung Choi (2019) telah membagi kategorisasi jalur politik perempuan untuk menduduki kepemimpinan politik menjadi tiga jalur. Kategorisasi ini kemudian disebut sebagai trikotomi jalur politik perempuan. Ketiga jalur itu meliputi *elite pathways* (jalur elit), *grassroot pathways* (jalur akar rumput), dan *middle pathways* (jalur tengah). Aspek yang mendasari pengelompokan jalur tersebut adalah motivasi perempuan untuk mengejar jabatan politik dan bagaimana mereka melakukannya. Motivasi secara khusus mempunyai dampak jangka panjang terhadap perjalanan politik perempuan, baik dalam hal gaya kepemimpinan mereka atau pilihan jalur mobilitas politik yang berbeda.

Dimensi yang menjadi penanda dalam pengelompokan kategorisasi jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Perbandingan Trikotomi Jalur Politik Perempuan

Dimensi & Jalur	<i>Elite Pathways</i>	<i>Grassroots Pathways</i>	<i>Middle Pathways</i>
Motivasi	Persuasi oleh kerabat laki-laki. “Taktik pemanasan” untuk mempertahankan dan memperluas reputasi keluarga.	Kekecewaan terhadap politisi (laki-laki) yang korup dan tidak kompeten. Kekuasaan politik dicari sebagai sarana pengambilan keputusan.	Ambisi (imbalance materi atau prestise sosial). Politik sebagai panggilan jiwa, wirausahawan atau penantang politik.
Modal Politik	Ikatan kekeluargaan. Dukungan dari mesin dan koneksi politik kerabat, pengenalan nama.	Pengalaman. Komitmen terhadap “rakyat”. Kepercayaan dari para pendukung, prestasi dan reputasi pribadi.	Kebijakan afirmasi. Sorotan media, koneksi pribadi atau jaringan sosial.
Strategi	Membawa nama keluarga. Penggunaan simbolisme feminin elitis, “modal moral gender”.	Reputasi feminin (kepedulian, lembut, ramah) atau mengasumsikan “peran sosiologis” laki-laki.	Campuran dari model kampanye lama dan kampanye baru. Penggunaan yang fleksibel dari aura feminin dan maskulin.
Kondisi Pribadi	Bisa muda atau tua. Relatif berpendidikan tinggi, pengalaman politik singkat, keamanan finansial.	Sampel yang diamati relatif tua. Memiliki pengalaman politik yang panjang, kurangnya sumber daya.	Generasi muda. Relatif berpendidikan tinggi, latar belakang kelas menengah.

Sumber: Temuan Choi (2019)

a. Elite Pathways

Ikatan keluarga menjadi sangat penting bagi karir politik perempuan, meskipun laki-laki juga mendapat manfaat dari jaringan kekeluargaan untuk kepentingan politik (Ufen, 2006; Hawkesworth, 2012). Politisi perempuan yang berasal dari jalur elit seringkali belajar politik dari anggota keluarga laki-laki dengan mendampingi mereka, memobilisasi dukungan untuk mereka, serta berbagi tanggung jawab dan memberikan nasihat kepada mereka. Koneksi elit yang dimiliki keluarga membuka akses yang lebar. Tantangan bagi perempuan yang menempuh jalur ini adalah mereka masih harus “membuktikan diri” kepada para rival politiknya, terutama politisi laki-laki.

b. Grassroots Pathways

Perempuan akar rumput menghadapi serangkaian kesulitan yang tidak dapat dihindari, termasuk kurangnya sumber daya keuangan, pengalaman politik atau pemilu, koneksi, dan pengakuan publik. Pada saat mereka memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilu, mereka biasanya sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun atau puluhan tahun bekerja bersama organisasi maupun komunitas lokal. Sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mapan. Perempuan yang tumbuh melalui jalur akar rumput kurang memiliki basis kelembagaan yang kuat. Karena itu, resistensi dari lawan atau elit yang telah mapan kadang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

c. Middle Pathways

Jalur tengah yang disebut Choi (2019) dalam trikotominya mencerminkan perubahan sosio-ekonomi, demografi, dan kelembagaan, dimana banyak

perempuan terpelajar menggunakan politik sebagai sarana untuk mobilitas vertikal dalam memperjuangkan kesetaraan gender, namun tidak sepenuhnya melepaskan diri dari atribusi lingkungan elit yang turut dimiliki. Politik dikarakterisasi sebagai pekerjaan melalui eksperimen kewirausahaan dengan beragam strategi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Perempuan yang berada di jalur menengah sangatlah beragam, mulai dari istri, saudara perempuan dan anak perempuan dari politisi terpilih atau pensiunan, akademisi, pengacara dan advokat, pemilik usaha kecil, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil. Beberapa dari mereka berpotensi mengais keuntungan materi dan atau prestise sosial.

Sinpeng & Savirani (2022) kemudian memperluas cakupan kajian tentang jalur kepemimpinan politik perempuan, dengan menyorot pentingnya memahami konteks lokal tempat munculnya kandidat perempuan. Meskipun keputusan mereka untuk terjun ke dunia politik merupakan sebuah pilihan, tetapi pilihan mereka dibentuk oleh konteks ekonomi, budaya, sosial, dan politik tempat mereka berada. Cara mereka mengejar perubahan politik berbeda-beda. Sinpeng & Savirani (2022) melengkapi temuannya dengan pemahaman bahwa perbedaan posisi sosial dan kekuasaan akan membentuk identitas dan akses politik yang berbeda. Adapun model masing-masing jalur adalah sebagai berikut:

- a. *The networkers*, merupakan salah satu jalur dengan aset utama berupa jaringan pribadi dan jaringan profesional. Hubungan jaringan dengan lembaga, keluarga atau kelompok, merupakan kekuatan pendorong utama yang membuka jalan bagi kepemimpinan politik. Jaringan dan nama keluarga mereka yang mapan adalah aset terbesar mereka sebagai kandidat dan politisi yang sukses.

- b. *The trailblazer*, ditandai dengan politik kewirausahaan. Model jalur ini berlaku bagi perempuan yang memetakan perjalanan mereka sendiri menuju kepemimpinan dengan mendirikan partai politik, organisasi, atau kelompok baru untuk mengadvokasi perubahan politik. Model ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari hambatan kelembagaan bagi politisi perempuan.
- c. *The activists*, dicontohkan melalui upaya berkelanjutan untuk mengadvokasi perubahan politik. Perempuan yang mengambil jalur ini cenderung mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama, sering kali bekerja dengan prinsip *bottom up* atau merintis dari bawah untuk melenting ke atas. Beberapa dari mereka melihat aktivisme sebagai batu loncatan untuk memasuki politik formal.

Ada variasi dalam cara pemimpin perempuan menyesuaikan diri dengan setiap jalur. Posisi perempuan dalam masyarakat dan konteks politik tempat ia muncul masih berperan penting, hal itu menentukan sifat dan panjangnya lintasan jalur menuju kepemimpinan politik (Sinpeng & Savirani, 2022). Jalur menuju kepemimpinan politik memiliki panjang yang berbeda, dari pendek, sedang, hingga panjang. Panjang jalur mencerminkan jumlah dan jenis hambatan yang dihadapi setiap perempuan dalam mengejar kepemimpinan politik.

a. *Short Pathway*

Mengacu pada jalur dengan hambatan paling sedikit. Jalur ini cenderung mencirikan perempuan dengan posisi mampu memaksimalkan peluangnya untuk berhasil dalam kepemimpinan politik. Ini bisa berarti bahwa ia berasal dari latar belakang elit, tidak menganggap dirinya sebagai minoritas, berkecukupan secara

finansial, dan memiliki tanggung jawab pengasuhan yang minimal. Perempuan dari keluarga elit politik menikmati jalan masuk yang paling cepat dan paling mudah ke dalam kepemimpinan politik di antara perempuan lainnya. Atribusi elit dengan sejumlah sumber daya sangat berpengaruh untuk membentuk *branding* kandidat, meningkatkan kredibilitas, dan membangun kepercayaan publik.

b. Medium-length Pathway

Jalur ini menggambarkan kadar hambatan sedang dan mencirikan rute yang memiliki sejumlah rintangan, tetapi rintangan tersebut dapat diatasi jika diberi waktu. Pemimpin perempuan yang telah mengambil jalur kepemimpinan dengan panjang lintasan sedang memiliki sumber daya atau aspek tertentu dari posisi yang membantu dalam mengejar kepemimpinan politik, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan mereka. Misalnya, seorang perempuan elit yang merupakan minoritas agama dengan jaringan bisnis dan sumber daya keuangan mungkin ingin bergabung dengan partai politik untuk mencalonkan diri, tetapi dia tidak memiliki jaringan politik. Jalannya menuju kepemimpinan politik akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan seorang pemimpin yang berasal dari keluarga politik.

c. Long Pathway

Menunjukkan jalur yang paling banyak hambatannya. Perempuan yang memperoleh peran kepemimpinan melalui lintasan jalur yang panjang cenderung berasal dari posisi yang memiliki beberapa kelemahan struktural, seperti status sosial ekonomi rendah, kekurangan sumber daya finansial, akses terbatas ke jaringan politik, sosial, dan bisnis, dan atau menjadi anggota minoritas yang

mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Perempuan di jalur ini membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai kepemimpinan politik, sebagian karena tidak ada yang membuka akses bagi mereka. Dalam kata lain, mereka harus berusaha sendiri untuk menembus berbagai hambatan dan membangun modalitas untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Panjangnya jalur tersebut juga sebagian dijelaskan oleh kurangnya kepercayaan diri karena mereka sering menghadapi kritik dan prasangka dari orang lain yang menghalangi mereka untuk mengejar posisi struktural atau kepemimpinan politik.

Variasi panjangnya lintasan jalur masih menunjukkan bahwa perempuan elitlah yang paling diuntungkan karena menempuh rute paling pendek untuk mencapai kepemimpinan politik. Namun, tantangan besar telah menanti mereka di masa setelah kontestasi untuk mempertahankan dan merawat jaringan serta semua modalitas yang melekat. Karena kapabilitas dan nilai ideologis mereka belum terbangun secara matang, maka seringkali tugas merawat jaringan akan melibatkan kerabat-kerabat dan kolega mereka (Sinpeng & Savirani, 2022).

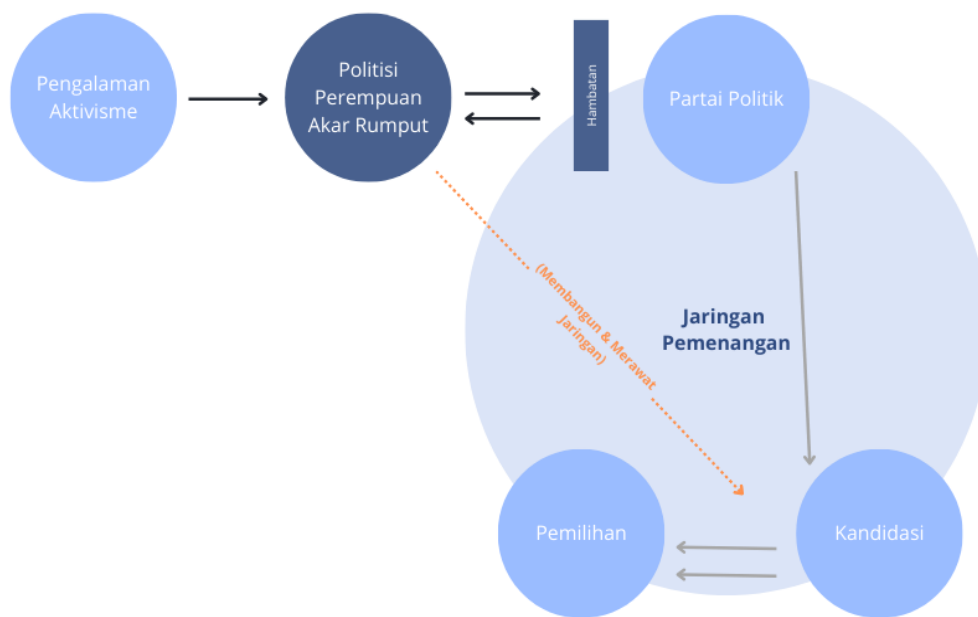
Sebaliknya, perempuan akar rumput cenderung menempuh lintasan jalur yang paling panjang, namun lebih matang ketika terpilih. Mereka memanfaatkan pengalaman aktivisme untuk memupuk keterampilan dan menjemput kepercayaan. Pengalaman itu menjadi semacam investasi sosial. Sebagian besar dari mereka memulai kiprahnya dengan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran demi organisasi serta isu yang mereka tekuni. Semakin sukses kinerja mereka dalam organisasi atau advokasi, maka semakin besar peluang mereka memperluas jaringan dan menembus aset yang berharga, seperti rekomendasi partai politik

misalnya. Visibilitas dan kredibilitas kandidat di mata pemilih dapat ditentukan oleh partisipasi aktif mereka dalam jaringan sosial (Sanbonmatsu, 2003).

1.7. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1.

Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti (2024)

1.8. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat empat konsep utama yang digunakan. Keempat konsep tersebut meliputi jaringan pemenangan, politisi perempuan akar rumput, membangun jaringan pemenangan, dan merawat jaringan pemenangan. Adapun operasionalisasi konsep sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Jaringan Pemenangan	Salah satu jenis jaringan sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan atau <i>interest</i>. Konteks kepentingan yang dimaksud adalah kesamaan tujuan untuk memenangkan kandidat tertentu melalui agenda kontestasi politik. Dalam penelitian ini, kontestasi politik merujuk pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Pematang periode 2009, 2014, 2019, dan 2024.	- Jaringan formal (terbentuk dari mesin partai politik atau institusi resmi yang memiliki aturan, sistem, dan cara kerja yang mengikat) - Jaringan informal (dibentuk oleh kandidat dari relasi-relasi yang sifatnya non-formal seperti jaringan kultural, orang-orang yang tergabung menjadi tim sukses, dan sejenisnya)
Politisi Perempuan Akar Rumput	Perempuan yang terjun dalam dunia politik melalui jalur non-elit (tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan lingkaran dinasti) dan membangun sendiri modal politiknya dari mekanisme <i>bottom up</i>. Pengalaman mereka dibangun sejak lama melalui organisasi, komunitas, atau berbagai bentuk aktivisme seperti advokasi dan konsistensi menyuarakan isu lokal maupun isu gender. Dalam penelitian ini, politisi perempuan akar rumput yang dimaksud adalah Ajeng Triyani dari fraksi PKB DPRD Kabupaten Pematang.	- Latar belakang pribadi (keluarga, riwayat pendidikan, status sosial, kondisi finansial, pengalaman organisasi) - Motivasi yang mendasari untuk ikut serta dalam kontestasi politik - Akses ke jejaring politik Cara menembus kepemimpinan politik

Konsep	Definisi	Dimensi Konsep
Membangun Jaringan Pemenangan	Berbagai pendekatan yang diaplikasikan oleh kandidat untuk menghimpun, menghubungkan, dan mengintegrasikan orang-orang untuk bekerja sama dalam rangka membantu kandidat memenangkan kontestasi politik.	• <i>Bonding</i> (bersifat homogen, eksklusif) • <i>Bridging</i> (bersifat heterogen, inklusif, cenderung sejajar) • <i>Linking</i> (bersifat heterogen dan vertikal)
Merawat Jaringan Pemenangan	Berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk menjaga jaringan pemenangan yang telah terbentuk agar tetap solid dan sinergis, serta kembali bekerja untuk mendukungnya dalam waktu lebih dari satu kali periode kontestasi politik.	• <i>Tertius gaudens</i> (menjadi pihak ketiga yang diuntungkan) • <i>Tertius iungens</i> (menghubungkan orang dengan fokus utama berupa kolaborasi) • Model kolaborasi (memakai kedua strategi secara fleksibel)
Tantangan Membangun dan Merawat Jaringan Pemenangan	Konsekuensi yang muncul dari adanya disparitas jalur politik perempuan dan memerlukan keterampilan dari kandidat untuk mengatasinya.	• Tantangan struktural (status sosial) • Tantangan institusional (dukungan partai) • Tantangan kultural (norma, budaya patriarki)

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, memahami, dan menganalisis suatu masalah sosial yang kompleks dengan melakukan pemaknaan serta penafsiran atas fakta dan data empiris yang didapat (Creswell & Creswell, 2018). Proses

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara spesifik dari partisipan penelitian dan analisis data dibangun dengan cara induktif dari sesuatu yang sifatnya khusus ke tema umum. Dalam pendekatan kualitatif, terdapat beberapa strategi penelitian yang dapat digunakan, seperti penelitian naratif, etnografi, fenomenologi, *grounded theory*, dan studi kasus (Creswell, 2015).

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus, karena berfokus untuk menganalisis fenomena yang sifatnya spesifik dan mendalam. Fenomena dalam penelitian ini adalah keterpilihan calon legislatif perempuan akar rumput dari fraksi PKB di Kabupaten Pematang Jaya. Adapun yang menjadi fokus analisis adalah upaya dan pendekatan yang ia lakukan untuk membangun dan merawat jaringan pemenangan. Strategi penelitian studi kasus memiliki sejumlah ciri yang relevan dengan pokok persoalan dalam penelitian, seperti berkenaan dengan pertanyaan penelitian berupa *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa), kecil peluang bagi peneliti untuk mengontrol peristiwa yang akan dikaji, serta fenomena penelitian merupakan fenomena kontemporer di kehidupan nyata (Yin, 2022).

Desain studi kasus dalam penelitian ini berjenis studi kasus tunggal terjal. Kasus sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan fenomena yang penting untuk menjelaskan kebenaran suatu proposisi dari teori yang sudah mapan atau terdapat alternatif penjelasan yang lebih relevan sesuai dengan temuan. Unit analisis dari kasus yang dipilih bersifat terjal karena melibatkan lebih dari satu unit analisis untuk meneliti jaringan pemenangan. Dalam penelitian ini, Ajeng Triyani adalah unit analisis utama dan unsur-unsur dari jaringan pemenangan menjadi unit analisis lainnya untuk menghubungkan temuan.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Pemalang, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) Pemalang III yang meliputi Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Petarukan sebagai daerah pemilihan Ajeng Triyani dalam Pileg Pemalang. Penelitian ini juga berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pemalang dan Kantor DPC PKB Kabupaten Pemalang. Lokasi tersebut memiliki keterkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, serta menjadi tempat untuk mengarahkan peneliti menggali keterangan lebih jauh dengan para informan.

1.9.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni peneliti telah memiliki sejumlah kriteria tertentu untuk memilih informan. Adapun kriteria yang dimaksud adalah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan jaringan dan proses pemenangan Ajeng Triyani, mengetahui dan memahami pertanyaan-pertanyaan penelitian, atau direkomendasikan oleh informan kunci untuk dimintai informasi. Dalam kata lain, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball* untuk menggali data lebih lanjut agar informasi-informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.**Daftar Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Atribusi
1.	Ajeng Triyani, A.Md.	Anggota DPRD Kabupaten Pemalang (informan kunci)
2.	Sugi Hadiyanto, A.Md.	Kepala Desa Tegalsari Timur
3.	Dr. Ir. Fahmi Arifan, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng	Dosen, Anggota GP Ansor Pemalang, Konsultan PKB Pemalang
4.	Ma'mun Riyad, S.Sos.	Wakil Ketua DPC PKB Pemalang
5.	Drs. Martono, M.A.	Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
6.	Drs. Mulyanto, M.A.P.	Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
7.	Siti Muyassaroh, S.Pd., M.M.	Ketua PC Fatayat NU Pemalang
8.	Ika Purwanti, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris PC Fatayat NU Pemalang
9.	Roihatul Jannah, S.Ag.	Wakil Ketua PAC Muslimat NU Ampelgading
10.	Kadarsih, S.Pd.	Ketua PAC Muslimat NU Petarukan
11.	Maria Ulfa	Ketua PR Fatayat NU Kebagusan
12.	Kusweni	Kordus Tegalsari Timur
13.	Natasha Rara	Anggota KPPS Tegalsari Timur
14.	Yuliawan	Staf Setwan
15.	Andi	Pengusaha
16.	Alam	Saksi TPS 1 Kebagusan
17.	Abidin	Tim Sukses Ajeng
18.	Soleha	Tim Sukses Ajeng

Sumber: Data Penelitian Lapangan (2024 – 2025)

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat dan bagan, gambar, serta tabel untuk memperkuat narasi serta mempermudah pemahaman. Sumber data dalam penelitian didapat melalui data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip, dan literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi berita yang berasal dari sumber kredibel.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian studi kasus, multi-sumber bukti penting dikumpulkan untuk memastikan peneliti memiliki data yang cukup. Sekurang-kurangnya, penelitian studi kasus harus memiliki dua atau lebih sumber data yang digunakan secara terintegrasi untuk melengkapi satu sama lain (Yin, 2022). Penelitian ini menggunakan beberapa strategi untuk mengumpulkan data, meliputi:

- a. Wawancara, merupakan sumber informasi yang esensial dalam penelitian studi kasus. Wawancara merupakan proses penggalan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam. Selain itu, wawancara berkontribusi untuk melahirkan saran-saran terkait informan potensial lain yang memiliki relevansi dengan data yang dibutuhkan, serta membuka akses untuk sampai pada yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang sifatnya terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan kepada informan yang

berada di lingkungan formal, seperti DPRD Kabupaten Pemalang, DPC PKB Pemalang, dan Pemerintah Desa Tegalsari Timur. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan dengan informan-informan hasil *snowball sampling*, tidak sengaja bertemu, dan berada di lingkungan sehari-hari peneliti. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan *by phone* melalui *WhatsApp* untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab serta menindaklanjuti dokumen maupun informasi yang diperlukan pada hari yang berbeda dengan jadwal wawancara tatap muka.

Prosedur wawancara diawali dengan mengirimkan surat izin penelitian dari fakultas ke instansi terkait. Instansi pertama yang dituju adalah DPRD Kabupaten Pemalang. Sebelum datang ke lokasi, peneliti telah membuat janji terlebih dahulu melalui *chat WhatsApp* untuk menentukan tanggal dan waktu pertemuan. Terjadi tiga kali penjadwalan ulang untuk dapat bertemu dengan Ketua dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang karena padatnya agenda yang bersangkutan. Namun, kendala itu dapat diatasi karena peneliti kenal dekat dengan anak dari Ketua DPRD Pemalang. Setelah pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris DPRD Pemalang, peneliti memiliki akses yang lebih leluasa untuk menemui informan-informan lain karena telah mendapat izin.

Instansi berikutnya yang dituju adalah DPC PKB Pemalang. Di instansi ini tidak ada kendala yang berarti. Informan-informan lain yang berkaitan dengan PKB dan jaringan kultural NU lebih mudah ditemui karena peneliti dibukakan akses secara langsung oleh Ajeng Triyani. Termasuk untuk bertemu dengan informan yang berada di Desa Tegalsari Timur. Sebelumnya, peneliti

telah melakukan wawancara pendahuluan kepada Ajeng dan konsultannya di tahun 2024, sehingga *bonding* lebih terbangun dengan informan kunci.

Pelaksanaan wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini serupa dengan *accidental interview*. Peneliti bertemu dengan informan secara tidak sengaja pada saat bersama dengan informan kunci atau secara tiba-tiba dihubungkan. Di samping itu, informan lain ditemui dalam kehidupan sehari-hari karena dekat dengan lingkungan tempat tinggal peneliti. Wawancara tidak terstruktur lebih banyak dilakukan menggunakan percakapan informal dan sifatnya momentual, sehingga kurang memungkinkan untuk direkam dan dimintai dokumentasi.

- b. Observasi langsung, adalah kegiatan turun lapangan untuk melakukan pengamatan kepada subjek penelitian dan lingkungannya. Observasi bermanfaat untuk menyumbangkan tambahan informasi terkait fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara semi formal bersamaan dengan wawancara dan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh subjek penelitian utama bersama dengan jaringan atau konstituennya. Kegiatan tersebut meliputi Rapat Paripurna Dewan, Musrenbang, dan Kunjungan Dapil. Observasi juga dilakukan di sekitar Desa Kebagusan pada Bulan Januari menjelang Pemilu 2024 pada saat peneliti berada di Pernalang. Peneliti mengamati kecenderungan lingkungan sekitar dalam mendukung caleg dan berbincang-bincang dengan tim sukses Ajeng.
- c. Dokumentasi, merupakan proses mengumpulkan data dari sumber-sumber tekstual yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Data dari dokumentasi

memberikan manfaat untuk memperkuat atau memberikan rincian atas informasi yang didapat di lapangan. Dalam penelitian ini, jenis dokumentasi yang digunakan bersumber dari berkas-berkas administrasi, penelitian terdahulu, dan arsip yang dimiliki oleh informan.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan aktivitas berkelanjutan yang memerlukan refleksi secara konsisten terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan membuat catatan singkat selama penelitian. Dalam analisis data kualitatif, pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil bisa dilakukan secara simultan (Creswell, 2015). Kecenderungan peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menggunakan prosedur umum yang dikombinasikan dengan langkah-langkah khusus sesuai dengan jenis strategi penelitian yang digunakan. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur yang dicetuskan oleh Creswell & Creswell (2018) sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan mengolah data untuk analisis. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti mentranskrip wawancara, memindai materi, mengekstrak data lapangan, serta memilah dan mengorganisasi data ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan sumber informasi.
- 2) Memahami keseluruhan data. Proses ini menjadi penanda untuk membentuk pemahaman umum terhadap informasi yang telah dikumpulkan dan merenungkan maknanya secara keseluruhan. Peneliti menuliskan catatan khusus atau gagasan umum pada tahap ini terkait data yang telah dikumpulkan.

Tujuannya untuk mempermudah pembacaan terhadap kredibilitas dan pemahaman informasi.

- 3) Menganalisis secara lebih mendetail dilakukan dengan melakukan *coding* pada data. *Coding* adalah proses memecah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memberikan makna pada data tersebut (Rossman & Rallis, 1998). Tahap ini melibatkan beberapa langkah, seperti mengambil data tertulis atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses penelitian, memecah kalimat, paragraf, atau gambar ke dalam kategori-kategori tertentu, kemudian memberi label pada kategori-kategori tersebut dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali berasal dari bahasa yang digunakan oleh partisipan. Peneliti menggunakan warna atau *highlight* untuk menandai informasi yang penting.
- 4) Menerapkan proses *coding* untuk memberi deskripsi pada temuan yang akan dianalisis. *Coding* dilakukan untuk menghasilkan sejumlah tema atau kategori yang lebih sedikit. Tema-tema inilah yang akan digunakan dalam bagian hasil penelitian. Tema ini akan didukung dengan berbagai kutipan, sambil memperlihatkan perspektif yang terbuka untuk ditinjau ulang. Setelah tema-tema diidentifikasi melalui proses *coding*, peneliti menggunakan tema-tema ini untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Sehubungan dengan strategi penelitian studi kasus, tema-tema kecil dibangun dari proposisi teoritis yang digunakan dalam penelitian dan mereduksi temuan-temuan yang kurang relevan.

- 5) Menunjukkan proses penyajian kembali hasil analisis data. Pembahasan yang dimuat meliputi informasi deskriptif berkaitan dengan subjek penelitian dan kronologi fenomena, temuan-temuan penting di lapangan untuk menjawab rumusan masalah, serta keterkaitan antar tema. Analisis disajikan dalam bentuk narasi diikuti dengan bagan atau tabel untuk menyederhanakan kompleksitas dan gambar untuk mendukung atau memperkuat temuan.
- 6) Melakukan interpretasi data. Interpretasi dapat dihasilkan dari proses membandingkan temuan penelitian dengan informasi dari literatur atau teori yang digunakan. Dalam konteks ini, peneliti menekankan apakah hasil penelitian mendukung atau justru bertentangan dengan informasi yang telah ada sebelumnya.

1.9.7. Validitas Data

Validitas merupakan salah satu aspek penting dari penelitian kualitatif yang berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap akurat dari perspektif peneliti, partisipan penelitian, atau pembaca (Creswell & Miller, 2000). Penelitian ini menggunakan model triangulasi sumber data dengan cara memeriksa bukti dari masing-masing sumber-sumber penelitian, lalu menggunakannya untuk menyusun justifikasi tema secara logis dan terpadu. Sesuai dengan strategi penelitian studi kasus, penggunaan multi-sumber bukti merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam proses pengumpulan serta analisis data. Tema-tema yang dihasilkan dari berbagai sumber data atau sudut pandang partisipan akan meningkatkan validitas penelitian.